

IPTEKS AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI UTARA

Marre Ika Dalipang¹, Grisela Vivi Apita², Karlina Naibaho³, Hendrik Manossoh⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : marredalipang@gmail.com

ABSTRACT

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Province of Sulawesi Utara (North Sulawesi Disnakertrans) is a government organization established based on the Presidential Regulation Number. 18 of 2015 which discusses the Ministry of Manpower, Ministry of Manpower and Transmigration has the task of regulating government affairs in the field of labor and to assist the President's work in regulating government. The Ministry of Manpower and Transmigration as a government organization that uses accrual-based Government Information Systems as regulated in Peraturan Pemerintah No. 71 of 2010 contains accounting standards used by the government that regulate the financial statements of an institution. Financial statements are a description of the performance of an agency. This study aims to raise about the problems that exist in the application of accrual-based government accounting systems.

Keywords : Accrual based government Information Systems

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini pemerintah menerapkan Sistem Akuntansi yang Berbasis AkruaI dimana dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat memberikan informasi mengenai Laporan Keuangan secara terbuka dan akuntabilitas kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam menyelesaikan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan bisa di pertanggungjawabkan kepada media dan masyarakat secara periodik (Mardiasmo, 2002). Penjelasan tentang sistem akuntansi yang Berbasis AkruaI terdapat dalam Undang-undang perbendaharaan yang secara khusus pengaturannya diatur pada PP No. 71 Tahun 2010 dimana dalam peraturan ini menggunakan Akuntansi Berbasis AkruaI. Perlu diketahui secara bersama mengenai Akuntansi Berbasis AkruaI merupakan suatu transaksi ekonomi yang dapat diakui, serta dicatat dalam laporan keuangan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau lebih dikenal sebagai Disnakertrans merupakan lembaga pemerintah yang memiliki fungsi dalam mengendalikan pengawasan pada bidang ketenagakerjaan dengan memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan penyedia lapangan pekerjaan kepada para pencari kerja dengan memberikan kesempatan kerja secara luas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pemerintah.

Akuntansi pemerintah yaitu suatu bidang akuntansi yang memiliki keterkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lain dengan maksud tujuan mencari laba Revrisond Baswir (2000:7). Akuntansi pemerintah menyediakan informasi secara khusus untuk entitas pemerintah untuk dalam mengambil keputusan dari pihak-pihak yang berkepentingan Abdul Halim (2002:143). Sedangkan Akuntansi Pemerintah menyediakan informasi mengenai Laporan Keuangan pemerintah melalui proses pencatatan setiap transaksi Laporan Keuangan pemerintah atas informasi keuangan (Bachtiar Arif dkk (2002:143). Jadi

dapat disimpulkan bahwa defenisi akuntansi pemerintah yaitu suatu proses pencatatan, pengklaifikasian, pengikhtisaran, laporan keuangan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga pemerintah dengan memiliki tujuan mencari laba.

2.2 Berbasis Akrual.

Defenisi akuntansi pemerintah yang dikemukakan oleh para ahli bahwa akuntansi yang berbasis akrual dapat diakui apabila dalam laporan keuangan terdapat pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas sebagai mana yang sudah ditetapkan dalam APBN/APBD.

2.3 Langkah-Langkah Implementasi dari SAP Berbasis Akrual.

Langkah-langkah proses Implementasi SAP Berbasis Akrual diantaranya yaitu:

1. Menyusun Bagan Akun Standar
2. Menetapkan Kebijakan Akuntansi
3. Penyusunan sistem akuntansi untuk pembukuan transaksi
4. Memilih strategi implementasi akuntansi berbasis akrual

3. METODE DAN TEKNIK IMPLEMENTASI IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Akuntansi yang berbasis akrual lebih menjelaskan dalam laporan keuangan tentang pengakuan pendapatan dan pengakuan beban dan belanja. Alasan menggunakan akuntansi berbasis akrual agar setiap pencatatan lebih efektif dan aktifitas ekonomi dicatat, termasuk didalamnya transaksi internal dan arus kas ekonomi lainnya. dengan hal ini penerapan akuntansi basis akrual merupakan sistem laporan keuangan yang bersifat relevan.

3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Teknik ipteks yang diterapkan adalah dengan menggunakan Standar Akuntansi Berbasis Akrual (Abdul Halimn 2002:41) dimana akuntansi dapat melakukan transaksi dengan baik apabila kas diterima atau dibayar.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

Disnakertrans Sulawesi Utara dengan memiliki visi yaitu “Terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya melalui pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang mandiri berdaya saing dan sejahtera” adalah merupakan sebuah instansi pemerintah yang bekerja dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan Meningkatkan Produktivitas Pelayanan Tenaga Kerja dan juga Memperluas Kesempatan Kerja bagi para pencari kerja.

4.2. Pembahasan

Disnakertrans Sulawesi Utara dalam Mengatasi Permasalahan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual mengambil langkah strategis dalam mengatasi permasalahan yang timbul diantaranya seperti :

1. *Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis secara bertahap.* Pelatihan yang dilakukan yang pertama kali yaitu pelatihan akuntansi berbasis akrual setelah sudah dipahami secara menyeluruh lanjut kepelatihan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
2. *Pendanaan atau biaya.* Dalam rangka pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Disnakertrans Sulawesi Utara membutuhkan dana yang besar untuk melakukan pelatihan untuk itu Pemerintah Disnakertrans Sulawesi Utara telah mengalokasikan anggaran untuk penerapan akuntansi berbasis akrual untuk setiap tahunnya berupa kegiatan yang ada dalam DPA SKPD dimana bidang perencanaan dan keuangan mengatur dan menyusun sehingga pendanaan atau biaya tidak menjadi permasalahan dalam pelaksanaannya.
3. *Teknologi informasi yang memadai.* Pada sistem akuntansi pemerintah seringkali terjadi perubahan teknologi informasi. Untuk mendukung pelaksanaan terjadinya pelaksanaan akuntansi berbasis akrual pada Disnakertrans Sulawesi Utara, teknologi informasi yang

diperlukan telah tersedia dan mendukung yaitu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Langkah-langkah Proses implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual diantaranya yaitu : Penyusunan bagan akun standar (BAS), menetapkan kebijakan akuntansi, penyusunan sistem akuntansi untuk pembukuan transaksi, memilih strategi implementasi berbasis akrual.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil yang didapat pada penelitian ini dapat disimpulkan untuk melakukan standar akuntansi berbasis akrual pada Disnakertrans Sulawesi Utara dalam membuat suatu sistem baru memerlukan banyak proses yang harus ditempuh untuk merubah sistem yang ada dengan melakukan perubahan pada beberapa aspek dan pelaksanaannya. Untuk mengatasi permasalahan itu maka pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengambil langkah untuk untuk menyelesaikan masalah itu diantaranya: (1) mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis berjenjang (2) pendanaan atau biaya (3) teknologi informasi yang memadai yang dimaksudkan disini dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

5.2. Saran

Sangat diperlukan kerjasama dari instansi pemerintah karyawan atau pegawai bekerja pada Disnakertrans Sulawesi utara untuk mewujudkan Penerapan Standar Akuntansi yang Berbasis Akrual agar bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hal yang baik pula

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdony, A. (2015). *Strategi penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota “ S “)*. Jurnal Neo – Bis. 9 (1), 1 – 19.
- Bria Taruna Nugraha. (2015). *Penilaian Pada Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 (Studi Kasus Pada Dinas PU Kabupaten Minahasa Utara)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulagi : Manado.
- Eliada, H, Sukirman, S, dan Fairus, S, A. (2017). *Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Inspektorat Jendral Kementrian Keuangan*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. 19 (1), 13 – 27.
- Idha, P. (2017). *Aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Khoirul, M, J, K. (2014). *Tingkat Pemahaman Akuntansi Berbasis Akrual Pada Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Kiranayanti, I, A, E., dan Erawati, N, M, A. (2016). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal Riset Universitas Udayana, 16 (2), 1290 – 1319.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*.
- Putra, IW, G, Y, D., Dan Aryanyo, D. (2015). *Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Jurnal Riset Universitas Udayana, 13(1), 14 – 32 .

- Salemba Empat.(2012). *Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010*.
- Syarienda, Y., Basri, H., dan Fahlevi, H. (2014). *Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Aceh tengah*. Jurnal Prespektif Darusalam. 4 (1), 56 – 68.
- Yuni, L, A. (2017). *Penilaian Pelaksanaan Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta.